

EFEKTIVITAS KARTU KREDIT PEMERINTAH DAERAH (KKPD) DALAM PELAKSANAAN BELANJA DAERAH PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN KARAWANGDita Novia Hidayat¹, Ujang Suherman²

Manajemen, Universitas Buana Perjuangan, Karawang, Indonesia

mn22.ditahidayat@mhs.ubpkarawang.ac.id , ujang.suherman@ubpkarawang.ac.id**Abstract**

BPKAD is one of the suitable and quality places for students majoring in management with a concentration in finance to carry out Practical Work activities, because at BPKAD students can explore how to manage finances in local government with field work practices. This Practical Work also aims to observe the effectiveness of the Local Government Credit Card in the implementation of regional spending at the Karawang Regency Regional Financial and Asset Management Agency. This practical work uses a descriptive method. By explaining and describing the results of the implementation of Practical Work at BPKAD Karawang Regency. Data was collected using observation methods and direct observation at BPKAD Karawang Regency and conducting interviews to collect data through questions and answers with BPKAD Karawang Regency employees. The results of observations during Practical Work show that the Local Government Credit Card has a positive impact on the implementation of regional spending. However, there are still some obstacles such as there are still many goods and service providers who have not provided Qris because they prefer direct transactions to using the Local Government Credit Card. It can be summarized that the Local Government Credit Card is effective in the implementation of local spending, although efforts are still needed to improve socialization and expand cooperation between the Local Government Credit Card issuing bank and goods and service providers.

Keywords: *Local Government Credit Card, Local Expenditure, Effectiveness, BPKAD, Karawang Regency*

Abstrak

BPKAD adalah salah satu tempat yang sesuai dan bermutu bagi mahasiswa jurusan manajemen dengan konsentrasi keuangan untuk melaksanakan kegiatan Kerja Praktik, karena pada BPKAD mahasiswa dapat menekuni cara mengelola keuangan dalam pemerintahan daerah dengan praktik kerja lapangan. Kerja Praktik ini juga bertujuan untuk mengamati efektivitas Kartu Kredit Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan belanja daerah di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Karawang. Kerja Praktik ini menggunakan metode deskriptif. Dengan menjelaskan dan menggambarkan mengenai hasil pelaksanaan Kerja Praktik di BPKAD Kabupaten Karawang. Data diambil dengan menggunakan metode observasi dan pengamatan langsung pada BPKAD Kabupaten Karawang serta melakukan wawancara untuk pengumpulan data melalui tanya jawab dengan pegawai BPKAD Kabupaten Karawang. Hasil pengamatan selama Kerja Praktik menunjukkan bahwa Kartu Kredit Pemerintah Daerah memberikan dampak positif dalam pelaksanaan belanja daerah. Namun, masih terdapat beberapa kendala seperti masih banyak penyedia barang dan jasa yang belum menyediakan Qris karena lebih memilih transaksi langsung dibandingkan menggunakan Kartu Kredit Pemerintah Daerah. Dapat disimpulkan, Kartu Kredit Pemerintah Daerah efektif dalam pelaksanaan belanja daerah, meskipun masih diperlukan upaya dengan meningkatkan sosialisasi serta perluasan kerja sama antara bank penerbit Kartu Kredit Pemerintah Daerah dengan penyedia barang dan jasa.

Kata Kunci: *Kartu Kredit Pemerintah Daerah, Belanja Daerah, Efektivitas, BPKAD, Kabupaten Karawang*

Article history

Received: Juni 2025

Reviewed: Juni 2025

Published: Juni 2025

Plagiarism checker no 80

Doi : prefix doi :

[10.8734/musytari.v1i2.365](https://doi.org/10.8734/musytari.v1i2.365)**Copyright : author****Publish by : musytari**

This work is licensed under a [creative commons attribution-noncommercial 4.0 international license](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

1. Pendahuluan

Berkembangnya teknologi informasi salah satunya pada bidang keuangan telah mendorong adanya perubahan pada sistem transaksi yaitu dengan cara transaksi non tunai. Terdapat kelebihan dari transaksi non tunai antara lain lebih fleksibel dan memudahkan dalam pencatatan transaksi. Salah satu jenis transaksi non tunai yang biasa digunakan yaitu menggunakan kartu kredit [1]. Berdasarkan Perbup Kabupaten Karawang Nomor 262 Tahun 2023 [2], Pada era pembaharuan ini, pemerintah berusaha untuk mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang baik melalui pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang perlu dikelola secara tertib, taat pada aturan yang ada, efektif, efisien, dan terbuka. Sesuai dengan berkembangnya teknologi modern saat ini perlunya suatu sistem untuk mengelola keuangan daerah yang lebih mudah dan cepat salah satunya yaitu dengan menerapkan sistem transaksi non tunai menggunakan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD). Kepemimpinan di dalam organisasi memegang peranan kunci dalam menentukan arah dan strategi perusahaan. Salah satu gaya kepemimpinan yang muncul sebagai pendekatan efektif adalah *humble leadership* atau kepemimpinan rendah hati. Kepemimpinan jenis ini ditandai dengan sikap rendah hati, keterbukaan, dan keinginan untuk selalu belajar dan mendengarkan masukan dari anggota tim. Pemimpin yang rendah hati tidak hanya berfokus pada pencapaian pribadi, tetapi lebih pada pemberdayaan karyawan, menciptakan lingkungan kerja yang kondusif, serta mendorong partisipasi aktif dari seluruh anggota tim. Sikap ini membuka peluang untuk pertumbuhan pribadi dan profesional di dalam organisasi, serta menciptakan budaya kerja yang inklusif dan kolaboratif.

Salah satu Pemerintah Daerah yang juga memiliki tugas sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) yaitu Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Karawang (BPKAD). BPKAD Kabupaten Karawang merupakan badan pemerintahan yang memiliki tugas pokok sebagaimana ditetapkan pada Perbup Kabupaten Karawang Nomor 78 Tahun 2021 [3] yaitu menjalankan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang keuangan sub pengelolaan keuangan dan aset daerah serta tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah. Kedua aspek ini, yaitu *humble leadership* dan profesionalisme, memiliki peran yang saling melengkapi dalam membentuk kinerja karyawan yang optimal. Kombinasi dari kepemimpinan yang memberdayakan dan profesionalisme yang kuat diharapkan dapat menciptakan sinergi yang mendorong tercapainya tujuan-tujuan strategis perusahaan. Dalam konteks UKM, di mana sumber daya seringkali terbatas, pentingnya peran *humble leadership* dan profesionalisme menjadi semakin signifikan, karena keduanya dapat menjadi pendorong utama dalam menghadapi tantangan dan memanfaatkan peluang yang ada.

Pada kegiatan Kerja Praktik (KP) ini penulis ditempatkan di bidang Perbendaharaan dengan sub bidang Manajemen Kas. Sub Bidang Manajemen Kas bertugas melaksanakan Penerbitan dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebagai dasar pencairan dana atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Berdasarkan hasil observasi Sub bidang Manajemen kas juga ditunjuk sebagai fasilitator atas pengajuan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Akan tetapi sampai saat ini masih banyak Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang belum melakukan pengajuan ataupun aktif menggunakan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD). Sedangkan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Karawang sendiri sudah mulai melakukan aktivasi Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) pada tahun 2024. Selain itu juga masih terdapat beberapa kendala dalam penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) antara lain KKPD yang digunakan merupakan KKPD Qris yang

transaksinya terdapat limit sehingga belum dapat mendorong percepatan realisasi belanja, masih banyak penyedia barang dan jasa yang belum menyediakan transaksi KKPD, dan aplikasi pengelolaan keuangan daerah yang digunakan pemerintah juga belum mendukung fitur penatausahaan KKPD.

Secara teoritis, kajian ini mengacu pada konsep Manajemen Keuangan [4] yang merupakan kegiatan untukantisipasi kebutuhan keuangan, memperoleh sumber pendanaan, dan mengalokasikan dana dalam bisnis untuk memaksimalkan keuntungan yang maksimal bagi perusahaan dan spesifik kepada Manajemen Keuangan Sektor Publik [5] yang merupakan langkah-langkah yang terdiri dari rencana, anggaran, tata Kelola, mengendalikan, dan pembuatan laporan atas digunakannya sumber daya keuangan pemerintah. Sementara itu, dari sisi efektivitas [6] yang merupakan ketepatan dalam melakukan dan/atau menggunakan sesuatu untuk mencapai tujuan, perlu diketahui apakah penggunaan KKPD telah menunjukkan kontribusi yang cukup signifikan dalam peningkatan realisasi belanja daerah.

Maka dari itu penulis tertarik untuk mencari tahu apakah Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) digunakan sesuai peraturan yang telah berlaku, dan untuk mengetahui tingkat efektivitas penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) dalam pelaksanaan belanja daerah tahun anggaran 2024 BPKAD Kabupaten Karawang dengan menyusun artikel yang diberi judul “Efektivitas Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) Dalam Pelaksanaan Belanja Daerah Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah”.

2. Tinjauan Pustaka Manajemen Keuangan

Menurut Suad Husnan & Enny Pudjiastuti [7] Manajemen keuangan yaitu aktivitas organisasi dalam mengatur keuangan dengan melakukan perencanaan, analisis, dan pengendalian keuangan. Menurut Irfani [8] Manajemen keuangan merupakan usaha dalam pencarian dan menggunakan dana dengan efisien serta efektif melalui kegiatan dalam mengelola keuangan untuk mewujudkan tujuan perusahaan.

Manajemen Keuangan Sektor Publik

Menurut Nwoko dan Anyanwu [9] Manajemen keuangan sektor publik merupakan sistem dalam penghasilan dan pengendalian sumber daya keuangan publik agar pelayanan publik dapat efektif dan efisien. Manajemen keuangan sektor publik terdiri dari rencana dan anggaran, Akuntansi dan laporan, pengendalian internal, audit dan pengawasan eksternal, yang bertujuan agar adanya peningkatan ketersediaan manfaat untuk jumlah masyarakat, dukungan untuk pemerintahan yang baik, serta memfasilitasi dalam mencapai 3 tujuan anggaran disiplin agregat fiskal, pengalokasian sumber daya dengan efektif dan pelayanan yang efisien.

Efektivitas

Menurut Handoko [6] Efektivitas yakni usaha dalam pemilihan sasaran yang sesuai untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dapat disebut efektif bila dapat memilih sasaran atau cara yang tepat untuk mencapai tujuannya. Efektivitas juga berarti melakukan kegiatan atau pekerjaan dengan sesuai.

3. Metodologi Penelitian

Kerja Praktik ini menggunakan metode deskriptif. Dengan menjelaskan dan menggambarkan mengenai hasil pelaksanaan Kerja Praktik di BPKAD Kabupaten Karawang. Data diambil dengan menggunakan metode dokumentasi dan observasi dengan pengamatan langsung pada BPKAD Kabupaten Karawang serta melakukan wawancara untuk pengumpulan data melalui tanya jawab dengan karyawan BPKAD Kabupaten Karawang.

Berdasarkan hasil wawancara dari 3 narasumber yaitu Kepala sub-bidang Manajemen Kas BPKAD, Bendahara Pengeluaran BPKAD, dan Ketua tim kelompok sub-substansi Keuangan BPKAD, penggunaan KKPD sudah hampir sesuai dengan tujuan yang dimaksud pada Perbub no. 262 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penggunaan Dan Penyelenggaraan KKPD, antara lain kesesuaian dari tujuan “Kemudahan penggunaan atau fleksibilitas kartu dengan jangkauan yang lebih luas.”, kesesuaian dari tujuan “keamanan dalam bertransaksi dan menghindari terjadinya penyimpangan.”, kesesuaian dari tujuan “efisiensi biaya administrasi transaksi Pemerintah Daerah dari penggunaan UP.” Dan kesesuaian dari tujuan “akuntabilitas pembayaran tagihan daerah dan pembebanan biaya penggunaan UP KKPD.”, selain itu masih ada juga tujuan yang belum sepenuhnya tercapai seperti “Transaksi dapat dilakukan di seluruh penyedia barang/jasa yang menerima pembayaran secara elektronik melalui mesin electronic data capture atau media dalam jaringan.” Tujuan tersebut belum sesuai karena tidak semua penyedia barang dan jasa menyediakan Qris KKPD.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa tujuan yang dimaksud dalam Perbub no. 262 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penggunaan Dan Penyelenggaraan KKPD sudah sesuai dan hampir tercapai sepenuhnya.

2. Integrasi

Berdasarkan hasil wawancara dari 3 narasumber yaitu Kepala sub-bidang Manajemen Kas BPKAD, Bendahara Pengeluaran BPKAD, dan Ketua tim kelompok sub-substansi Keuangan BPKAD, perjanjian antara BPKAD Kab. Karawang selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) dengan bank penerbit KKPD yaitu Bank BJB sudah terlaksana dengan baik, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) selaku Bendahara Umum Negara (BUN) sudah melaksanakan sosialisasi mengenai penggunaan KKPD dengan baik, akan tetapi sosialisasi antara BPKAD selaku PPKD dengan seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) masih belum terlaksana dengan baik sehingga masih banyak SKPD yang masih belum menggunakan KKPD sebagai alat transaksi karena banyak dari mereka yang belum paham mengenai alur penggunaan KKPD, selain itu Kerja sama antara bank penerbit KKPD dengan merchant-merchant juga sudah terlaksana cukup baik walaupun masih ada beberapa merchant yang belum menyediakan transaksi menggunakan KKPD.

3. Adaptasi

Berdasarkan hasil wawancara dari 3 narasumber yaitu Kepala sub-bidang Manajemen Kas BPKAD, Bendahara Pengeluaran BPKAD, dan Ketua tim kelompok sub-substansi Keuangan BPKAD, sarana dan prasarana penunjang KKPD juga sudah tersedia dengan baik sehingga memudahkan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam proses penerbitan KKPD, Teknologi informasi yang digunakan sebagai penunjang proses transaksi KKPD di daerah Karawang juga sudah cukup memadai walaupun masih ada beberapa penyedia barang dan jasa yang belum menyediakan transaksi KKPD.

4. Realisasi belanja daerah

Berdasarkan hasil wawancara dari 3 narasumber yaitu Kepala sub-bidang Manajemen Kas BPKAD, Bendahara Pengeluaran BPKAD, dan Ketua tim kelompok sub-substansi Keuangan BPKAD, dengan adanya kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) memudahkan penggunaan dalam melaksanakan belanja daerah karena jangkauan pemakaiannya yang lebih luas, Transaksi pun dapat dilakukan di seluruh penyedia barang dan jasa yang menerima pembayaran secara elektronik sehingga bendahara tidak perlu repot-repot menarik uang tunai, Dengan menggunakan KKPD juga dapat meningkatkan keamanan dalam bertransaksi dan dapat menghindari terjadinya penyimpangan, Belanja daerah pun terealisasi dengan baik karena tujuan adanya KKPD yaitu dapat

Tabel 1 Efektivitas realisasi belanja tahun anggaran 2023-2024

Tahun	Anggaran Belanja (Rp)	Realisasi Belanja (Rp)	Efektivitas	Kriteria
2023	743.922.904.410,00	731.129.615.063,00	98,28%	EFEKTIF
2024	820.453.166.717,60	767.536.289.794,00	93,55%	EFEKTIF

Sumber: BPKAD Kabupaten Karawang 2025

Belanja daerah pada BPKAD Kabupaten Karawang untuk periode belanja tahun 2023-2024 dapat dikatakan efektif karena memiliki tingkat efektivitas 90%, berdasarkan hasil perhitungan diatas saat KKPd aktif digunakan pada tahun anggaran 2024 juga masih di kriteria yang efektif yaitu dengan tingkat efektivitas 93,55%. Hal ini sesuai dengan indikator dalam pengukuran tingkat keefektifan yaitu jika hasil perbandingan antara realisasi dengan target belanja semakin tinggi maka dapat dikatakan dalam kategori efektif.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa saat digunakannya KKPd pada tahun 2024, KKPd telah digunakan sesuai dengan peraturan yang sudah ditetapkan. Pencapaian tujuan dari KKPd juga sudah terlaksana dengan baik walaupun masih terdapat beberapa kendala. Selain itu, tingkat efektivitas dalam pelaksanaan belanja daerah juga memiliki kriteria yang efektif karena memiliki tingkat efektivitas 90%.

4.2 Pembahasan

Berdasarkan hasil wawancara dari 3 narasumber yaitu Kepala sub-bidang Manajemen Kas BPKAD, Bendahara Pengeluaran BPKAD, dan Ketua tim kelompok sub-substansi Keuangan BPKAD, KKPd sudah aktif digunakan oleh BPKAD sejak Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) ditetapkan sebagai alat pembayaran dalam pelaksanaan belanja daerah pada tahun 2024. Pencapaian tujuan dari ditetapkannya KKPd sebagai alat pembayaran juga sudah tercapai dengan baik. Akan tetapi masih terdapat beberapa kendala dalam penggunaan KKPd diantaranya, saat itu hanya 5 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang baru menggunakan KKPd, karena banyak dari SKPD yang memang belum paham mengenai alur penggunaan KKPd. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bendahara Pengeluaran BPKAD Kab. Karawang masih terdapat beberapa kendala dalam penggunaan KKPd antara lain KKPd yang digunakan merupakan KKPd Qris yang transaksinya terdapat limit yaitu Rp.10.000.000,- per transaksi, sehingga belum dapat mendorong percepatan realisasi belanja sampai dengan Rp.200.000.000,- per penerima, serta masih banyak penyedia barang dan jasa yang belum menyediakan Qris karena lebih memilih transaksi langsung dibandingkan menggunakan KKPd.

Jika KKPd aktif digunakan oleh seluruh SKPD dapat memberikan kemudahan dalam pelaksanaan belanja daerah serta keamanan dalam bertransaksi sehingga dihindari dari adanya penyimpangan, selain itu KKPd juga dapat meningkatkan efektivitas dalam pengurangan Uang Persediaan (UP) yang menganggur sehingga belanja daerah juga dilaksanakan dengan efektif, walaupun masih terdapat beberapa kendala. Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut yaitu perlu dilakukan lagi sosialisasi antara BPKAD Kabupaten Karawang selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah Karawang (SKPD) agar penggunaan KKPd menjadi lebih mudah digunakan oleh SKPD. Dengan adanya sosialisasi yang berkelanjutan dapat memberikan pemahaman secara detail menjadi hal yang dilakukan BPKAD sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) terhadap

setiap SKPD. Selain itu, perlu adanya Kerja sama yang berkelanjutan antara bank BJB dengan merchant penyedia barang dan jasa pemerintah dalam hal penyediaan transaksi dengan menggunakan KKPD.

5. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengamatan selama kerja praktik sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka penulis dapat menarik Kesimpulan bahwa efektivitas Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) dalam pelaksanaan belanja daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Karawang yaitu sebagai berikut:

- a. Sejak Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) ditetapkan sebagai alat pembayaran dalam pelaksanaan belanja daerah pada tahun 2024, saat itu hanya 5 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang baru menggunakan KKPD. Saat KKPD diterapkan juga terdapat beberapa kendala salah satunya yaitu masih banyak penyedia barang dan jasa yang belum menyediakan Qris karena lebih memilih transaksi langsung dibandingkan menggunakan KKPD.
- b. Penerapan KKPD pada BPKAD Kabupaten Karawang telah sesuai dengan Perbub no. 262 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penggunaan Dan Penyelenggaraan KKPD.
- c. Pencapaian tujuan sebagaimana yang dimaksud dalam Perbub no. 262 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penggunaan Dan Penyelenggaraan KKPD sudah sesuai dan hampir tercapai sepenuhnya.
- d. Sarana dan prasarana penunjang KKPD juga sudah tersedia dengan baik sehingga memudahkan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam proses penerbitan KKPD, Teknologi informasi yang digunakan sebagai penunjang proses transaksi KKPD di daerah Karawang juga sudah cukup memadai walaupun masih ada beberapa penyedia barang dan jasa yang belum menyediakan transaksi KKPD.
- e. Efektivitas KKPD dalam pelaksanaan belanja daerah pada BPKAD Kabupaten Karawang telah tergolong efektif dapat dilihat dari adanya peningkatan dari realisasi anggaran antara tahun 2023 sebelum adanya KKPD dengan tahun 2024 sesudah adanya KKPD. Efektivitas KKPD juga dapat dilihat dari laporan realisasi anggaran pada tahun anggaran 2024 saat digunakannya KKPD telah mencapai lebih dari 90%.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] M. H. Akhmadi, C. Claudia, E. N. Wati, and M. S. Fuady, "Peningkatan Literasi Keuangan Instansi Pemerintah Dalam Pembayaran Digital Menggunakan Kartu Kredit Pemerintah," *J. Ilm. Manajemen, Ekon. Akunt.*, vol. 7, no. 2, pp. 26-45, 2023, doi: 10.31955/mea.v7i2.2172.
- [2] *Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Karawang Nomor 262 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penggunaan Dan Penyelenggaraan Kartu Kredit Pemerintah Daerah*. 2023. [Online]. Available: <https://peraturan.bpk.go.id/Details/277816/perbup-kab-karawang-no-262-tahun-2023>
- [3] *Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Karawang Nomor 78 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Karawang*. 2021. [Online]. Available: <https://peraturan.bpk.go.id/Details/218178/perbup-kab-karawang-no-78-tahun-2021>
- [4] C. A. Saputro, U. Suherman, and R. M. Pranata, "THE EFFECT OF DIGITAL PAYMENTS AND

FINANCIAL VULNERABILITY,” no. 2021, 2024.

[5] B. Lubis, *MANAJEMEN KEUANGAN SEKTOR PUBLIK*. Penerbit Widina Media Utama, 2024. [Online]. Available:

https://www.google.co.id/books/edition/MANAJEMEN_KEUANGAN_SEKTOR_PUBLIK/nikzEQAAQBAJ?hl=id&gbpv=1

[6] R. Ekasari, *MODEL EFEKTIVITAS DANA DESA UNTUK MENILAI KINERJA DESA MELALUI PEMBERDAYAAN EKONOMI*. AE PUBLISHING, 2020. [Online]. Available:

https://books.google.co.id/books?hl=en&lr=&id=rvXcDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR3&dq=info:Q8ZSxn5an1kJ:scholar.google.com&ots=grTGISriAZ&sig=9bvbZqmgWTY3uaft-QHZt-u_AY0&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false

[7] S. Hasan, Elpisah, J. Sabtohadhi, Nurwahidah, Abdullah, and Fachrurazi, *MANAJEMEN KEUANGAN. CV PENA PERSADA*, 2022. [Online]. Available:

https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=LXKCEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR5&dq=manajemen+keuangan&ots=PQWYkjvm29&sig=LDSHKc4jrn2rSrinJ-rz3eLyuMI&redir_esc=y#v=onepage&q=manajemen+keuangan&f=false

[8] A. Jaya *et al.*, *MANAJEMEN KEUANGAN*. PT GLOBAL EKSEKUTIF TEKNOLOGI, 2023. [Online]. Available:

https://digilib.iainptk.ac.id/xmlui/bitstream/handle/123456789/2992/MANAJEMEN_KEUANGAN_-743.pdf?sequence=1

[9] I. Bastian, *MANAJEMEN KEUANGAN PUBLIK*. PENERBIT ANDI, 2021. [Online]. Available:

https://www.google.co.id/books/edition/MANAJEMEN_KEUANGAN_PUBLIK/8T5DEAAAQBAJ?hl=id&gbpv=0